

BAB 5

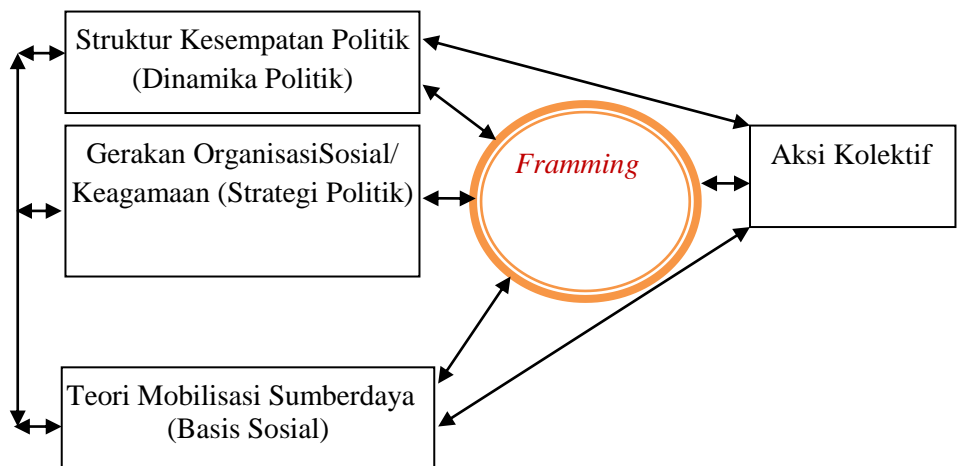
INTEGRASI GERAKAN SOSIAL PKS KEBUMEN

Bab kelima ini merupakan analisis teori pendekatan integrasi sosial PKS Kabupaten Kebumen yang meliputi: PKS sebagai Gerakan Sosial dan Politik, Ijtihad Politik PKS, Orientasi Ideologi Islamisme, Implikasi Teoritik, Kekuatan dan Kelemahan PKS, PKS sebagai genre baru Islam di Indonesia, dan Novelty.

5.1. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Gerakan Sosial dan Politik

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa kerangka berpikir dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar: 5.1
Kerangka Berpikir



Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber

Apabila PKS Kebumen merupakan organisasi gerakan sosial maka eksistensinya bisa dijelaskan dengan empat faktor (lihat gambar 5.1 tersebut di atas) yaitu: *pertama, political opportunity structure* (struktur kesempatan politik). Bahwa PK(S) pusat muncul bermula dari adanya situasi kondisi kegaduhan sosial dan politik (runtuhnya rezim Orde Baru) yang membuka celah struktur kesempatan politik. Adanya kebijakan konstitusi: UUD 1945, UU Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 tentang Kepartaian. *Kedua, Resource Mobilisation* (Mobilisasi Sumber Daya). Dalam hal ini, PKS Kebumen dapat memanfaatkan struktur kesempatan politik melalui mobilisasi sumber daya manusia (pendiri PKS Kebumen: Drs. Rahadi, Haryoko, S.Pd., Abdul Choliq, S.Kom. dan Drs. Mundzir Hasan merupakan aktivis Lembaga Dakwah Kampus), termasuk jejaring organisasi dan sumber dananya dalam rangka mendukung kesinambungan organisasi tersebut (lihat Bab 3: Basis Sosial PKS di Kabupaten Kebumen). *Ketiga, collective action framing* (pembingkaihan aksi kolektif). Di sini PKS secara sadar merespon atas terbukanya kesempatan politik dan peningkatan kapasitas organisasi dan infrastruktur untuk memobilisasi kader dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan, keyakinan, budaya dan ideologi yang bisa diterima bersama. *Keempat, Religious Movement (Gerakan sosial keagamaan)*. PKS Kebumen tidak bisa terlepas dari kebijakan institusi pusat yaitu adanya *framing* (pembingkaihan) isu-isu transnasional Islamis. Dalam hal ini, gerakan sosial keagamaan sebagai strategi politik PKS Kebumen melalui majelis taklim, halaqah, liqo, dan sebagainya. Tujuannya menjelaskan kepada masyarakat Kebumen bahwa PK(S) adalah partai politik yang mengusung ideologi Islam.

Secara singkat, bahwa PKS adalah partai politik yang dilahirkan melalui rahim gerakan sosial Islam yaitu Jama'ah Tarbiyah. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara PKS dan Jama'ah Tarbiyah. (Partai adalah Jama'ah, dan Jama'ah adalah Partai). PKS mengambil bentuk gerakan sosial keagamaan karena PKS tidak hanya mengartikulasikan agenda politiknya di dalam institusi partai yang terlembaga secara formal, akan tetapi juga menyatakan, mengekspresikan kepentingan politiknya melalui serangkaian aksi kolektif yang diikuti oleh para kader dan simpatisannya dan dilakukan secara regular.

5.2..“Ijtihad Politik” PKS sebagai Partai Terbuka yang Memicu Resistensi Internal dan Kader Partai

Kemunculan PKS di pentas politik merupakan fenomena yang unik dan menarik. Partai yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan ini mampu memberi warna baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Betapa tidak, partai yang pada awal berdirinya kurang diperhitungkan banyak orang ini tiba-tiba mampu tampil sebagai partai besar dan memperoleh suara signifikan mengungguli partai-partai Islam lain yang lebih tua dan memiliki akar sejarah yang panjang.

Namun ada sebagian masyarakat yang menaruh curiga terhadap PKS. PKS dianggap partai yang eksklusif serta menyimpan agenda tersembunyi (hidden agenda) untuk membentuk Negara Islam serta memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia. Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap PKS, akhirnya pada Musyawarah Nasional (Munas) II PKS mewacanakan diri bertransformasi menjadi partai terbuka (inklusif). Perubahan sikap politik PKS ini tentunya menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, serta menimbulkan tanda tanya besar. Mukernas telah dilaksanakan di Bali dari tanggal 1-3 Februari 2008 dengan

mengambil tema “Bangkit Negeriku! Harapan itu Masih Ada”. “Bangkit Negeriku! Harapan itu Masih Ada” sebagai satu tindakan partai yang cukup strategis dalam perluasan basis sosialnya maupun jangkauan gerakan dakwah partai.

Ada isu-isu kontroversial yang dipandang sebagai ijthad politik muncul dalam penyelenggaraan mukernas. Misalnya, pemilihan Bali sebagai tempat mukernas, ide menjadi partai terbuka dan isu Koalisi Merah Putih yang dilontarkan Hidayat Nurwahid, Ketua MPR yang juga mantan presiden PKS, telah menjadi perhatian banyak pihak kader maupun simpatisan PKS.

Penunjukkan Bali sebagai tempat mukernas kali ini sempat diperbincangkan secara hangat oleh kubu yang pro dan kontra di antara para simpatisan PKS. Bagi yang kontra beralasan bahwa Bali kurang strategis dijadikan objek dakwah oleh partai berbasis Islam ini, karena mayoritas penduduk Bali adalah Hindu. Melihat komposisi umat Islam Indonesia yang mayoritas 87 %, akan lebih strategis dan menguntungkan bagi PKS untuk menggarap objek dakwah yang mayoritas. Pendek kata, pulau Bali kurang signifikan untuk memperluas jangkauan, jumlah simpatisan dan konstituen partai. Kelompok ini berpendapat bahwa mukernas akan sangat strategis jika diselenggarakan di daerah yang mayoritas Muslim tapi minim kader dan simpatisan partai. Kemudian secara geografis dan ekonomis bahwa lokasinya jauh dari Jakarta akan mengeluarkan biaya tinggi, apalagi diselenggarakan di hotel Inna Grand Beach, Sanur yang bertarif paling murah 60 dolar Amerika per malam.

Menurut kelompok ini mukernas jauh lebih bermanfaat jika biaya tersebut buat menolong para ‘dhuafa’. Ada kader yang menunjuk daerah ‘Bantar Gebang’ Bekasi sebagai lebih berguna jika dijadikan tempat mukernas ketimbang di Bali. Dakwah politik PKS akan lebih bermanfaat dan terasa

signifikansinya jika mukernas dilaksanakan di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim.

Serunya kontroversi ini, sehingga DPP PKS mengeluarkan penjelasan resmi mengapa Bali dipilih sebagai tempat mukernas. DPP PKS menyebutkan bahwa keputusan pemilihan pulau Bali dibuat senafas dengan perkembangan pemikiran partai ke arah kemenangan pemilu 2009. Ini artinya strategi politik merupakan alasan utama mengapa Bali dipilih sebagai tempat mukernas kali ini.

Lebih jauh dijelaskan bahwa pemilihan Bali didasarkan pada kepentingan internal dan eksternal partai. Alasan internal antara lain untuk mengokohkan dakwah Islam dan posisi kader di daerah minoritas dan mengokohkan soliditas dan mobilitas PKS serta daya jangkau dakwah. Sementara alasan eksternalnya adalah untuk menegaskan pengakuan PKS kepada pluralitas dan keanekaragaman agama, suku dan budaya bangsa serta penghargaan kepada minoritas dan komitmen PKS untuk memberikan keadilan bagi semua warga negara termasuk kalangan minoritas. Alasan inilah, mengapa partai ini menyelenggarakan mukernasnya di Bali.

Ini terbukti dengan digemakannya secara signifikan bahwa PKS menuju partai yang terbuka bagi kalangan non-Muslim. Bukan rahasia lagi bahwa isu menjadikan PKS sebagai partai terbuka sudah lama bergulir di kalangan internal partai. Apakah hilangnya gema takbir yang merupakan ciri khas PKS dan digantikannya dengan teriakan 'merdeka' di sela-sela pembukaan mukernas juga merupakan salah satu strategi pengembangan menuju partai terbuka?(Detik.com.10 Juni 2010)

Strategi membangun citra PKS sebagai partai terbuka semakin jelas terlihat ketika Hidayat Nurwahid melontarkan wacana Koalisi Merah Putih. Hal ini diungkapkan Hidayat ketika mengunjungi Puri Satria di Denpasar. Ungkapan mantan

Presiden PKS ini tentu saja banyak menghentak warga dan simpatisan PKS. Apakah Hidayat sekedar basa-basi politik di sela-sela *kulonuwun* menjelang dilaksanakan mukernas atau memang PKS serius akan menjajagi koalisi religious-nasionalis antara PKS dan PDIP? Bukankah Bali memang dari dulu dianggap sebagai salah satu basis penting konstituent PDIP?

Statemen Hidayat Nurwahid sertamerta menjadikan kader simpatisan PKS bertanya-tanya tentang layakkah PKS bersinergi dengan PDIP? Banyak di antara kader partai yang mempersoalkan apakah PKS akan menanggalkan idealismenya sendiri sebagai partai Islam demi tujuan pragmatisme elektoralis dua puluh persen pada pemilu 2009?

Kubu yang kontra dengan ide menjadi partai terbuka, beralasan bahwa PKS telah melanggar 'khittah' partai yang sejak awal pendiriannya merupakan partai dakwah. Jika berubah menjadi partai terbuka, berarti PKS tidak lagi mempertahankan ciri khasnya dan sama dengan partai-partai Islam yang lain. Bagaimana PKS mempertahankan sistem tarbiyah dan halaqohnya melalui kegiatan liqo dan muqoyyam misalkan yang selama ini dijadikan basis pengkaderan dan rekrutmen anggota partai? Kalau tarbiyah yang sarat dengan nilai-nilai keislaman merupakan proses kegiatan partai untuk melatih integritas dan loyalitas partai, bagaimana hal ini bisa dilakukan jika kader partai yang non-Muslim semakin banyak? Bukankah ini berarti partai telah melakukan *blunder* dalam strategi politiknya?

Persoalan-persoalan seperti itu muncul di kalangan simpatisan partai yang pesimis jika PKS sebagai partai terbuka. Bahkan merasa khawatir dengan dideklarasikannya PKS menjadi partai terbuka justru akan ditinggalkan oleh kader mayoritasnya yang berlatar belakang tarbiyah. Pesimisme ini dibantah oleh para elite partai yang berpikir

sebaliknya. Elite partai berkeyakinan bahwa melihat dinamika politik kontemporer di tanah air, adalah mutlak bagi PKS untuk membuka diri bersifat inklusif dan pluralis jika ingin menambah konstituen partai. Bisa jadi kegagalan PKS pada beberapa Pilkada seperti pada pemilihan gubernur Banten dan Jakarta, karena PKS dikeroyok ramai-ramai.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa PKS tetap berazas Islam dan menjunjung tinggi kemajemukan. Syariah Islam tetap menjadi pedoman pribadi bagi para kader PKS. Artinya PKS berusaha mengakomodir dua kepentingan sekaligus yaitu menjunjung tinggi idealisme partai yang berazaskan Islam bagi kehidupan pribadi kadernya, sekaligus mengusung keterbukaan atau pluralisme sebagai salah satu strategi pengembangan komunitas partai demi kemenangan pemilu. Pertanyaannya, mungkinkah dua kepentingan itu bisa berjalan beriringan terutama di mata para kader tarbiyah yang dikenal militan?

Ijtihad politik ini, akhirnya laksana pedang bermata dua. Di satu sisi, dianggap *blunder* politik yang akan mengurangi suara PKS pada pemilu tahun depan dan memperkuat asumsi para pengamat yang menilai target 20 % adalah terlalu muluk-muluk, seperti dikatakan pengamat politik Qodari dari Indonesia Barometer. Di sisi lain, ijtihad politik ini justru akan meningkatkan citra partai dan menghilangkan stigma negatif PKS sebagai partai eksklusif yang pada akhirnya akan memunculkan optimisme baru bahwa partai ini akan semakin besar sebagaimana analisis Greg Fealy seorang Indonesianis dari Australia. Fealy mengatakan bahwa berdasarkan pada kesiapan partai, segi militansi kader, disiplin partai, serta citra PKS lebih baik ketimbang partai Islam lain, maka target 20 persen adalah hal yang wajar.

Peneliti Center for Election of Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Imerinda Alamasari, menilai, Partai

Keadilan Sejahtera sesungguhnya belum siap menjadi partai terbuka. Sifat kader PKS yang eksklusif dianggap tidak bisa menerima konsep partai terbuka yang ditawarkan para elite PKS. "Mereka itu sebenarnya belum siap. Dia (Anis Matta) bilang partainya universal, tapi nyatanya melakukan dakwah yang terbatas, pengajiannya bersifat khusus seperti *halaqoh*, *liqo*. Apa iya mereka masuk ke pengajian ibu-ibu? Kan tidak. Jadi konsep terbuka hanya di tataran elite saja," ujar Imerinda.

Imerinda mengatakan, PKS selama ini kuat karena kader internalnya merasa nyaman mempertahankan prinsip Islam yang eksklusif di partai itu. Dengan eksklusivitas itu, mesin partai PKS berhasil digerakkan secara militan oleh para kadernya. Imerinda mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan tingkat resistansi kader PKS terhadap konsep partai terbuka. "Coba saja dicek, berapa banyak kader PKS yang tersisa? Karena begitu non-Islam masuk, mereka merasa tidak lagi sejalan dengan PKS," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepala daerah asal PKS justru menunjukkan eksklusivitasnya seperti yang dilakukan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Ia memberi contoh, Nur Mahmudi memperkenankan perumahan khusus Muslim menjamur di kawasan Depok seperti Mawar Residence, perumahan Tugu, dan perumahan Orchid. Imerinda pun pernah mengalami pengalaman pahit tidak diterima di perumahan khusus Muslim itu. Di sisi lain, katanya, izin pembangunan gereja di kawasan Cinere dipersulit karena tidak adanya izin dari kelurahan dan wali kota. "Jadi PKS jangan mentang-mentang. PKS kalau di politik di mana letaknya? Anis Matta bilang hanya 1/3 dari 1/3 kan, kecil banget. Masyarakat kita masih lebih besar penganut Islam tradisional seperti PKB dan PPP," ucap Imerinda.

Setelah Munas PKS 16-20 Juni 2010, wacana PKS menjadi “Partai Terbuka” muncul lagi. Masyarakat membaca adanya dinamika internal PKS yang cukup kuat. Di samping, Sekretaris Jenderal PKS memunculkan ide itu secara antusiasme. Ternyata ada sebagian tokoh PKS yang menolak gagasan tersebut. Salah satu kader senior menyayangkan manuver-manuver tersebut, mustinya elite PKS tidak sembarangan dalam mengeluarkan alasan yang tidak sesuai dengan keputusan partai yang telah terdokumentasikan oleh daya ingat masyarakat.

Tokoh yang mula pertama kali menegaskan bahwa PKS berubah menjadi partai terbuka adalah sebuah perubahan besar yang secara sadar telah dilakukannya. Tokoh tersebut juga menepis kekhawatiran akan munculnya resistensi kader PKS terhadap wacana partai terbuka dengan menganalogikan bahwa kader-kader PKS itu ibarat “gerbong kereta api” yang akan ikut kemanapun “lokomotif” bergerak membawanya”.

Ide “Partai Terbuka” tak akan merubah identitas PKS sebagai Partai Dakwah. Gagasan “Partai Terbuka” ibarat “kotak baru” (perluasan basis sosial) bagi non muslim yang berminat masuk PKS. Dalam arti, sebagai anggota biasa non kader, sebab menjadi kader PKS harus ada muwashafat (bersyahadat) yang tidak boleh diabaikan. Bahkan ada seorang kader mengatakan, “Seterbukanya Partai Kader, tetap aja Partai Kader”.

Jadi solusinya dengan menambahkan dua tingkatan keanggotaan di bawah enam jenjang yang sudah ada yakni: Anggota Terdaftar dan Anggota Aktif. Kendatipun formulasi dalam AD/ART belum dirumuskan, tetapi ada gambaran bahwa ikrar setia kepada partai untuk kedua level tersebut tidak berisi syahadat. Dengan demikian, pernyataan yang beredar di masyarakat bahwa sekarang untuk menjadi anggota PKS tidak perlu bersyahadat lagi itu memang benar khusus

untuk dua jenjang keanggotaan yang terbawah, yaitu Anggota Terdaftar dan Anggota Aktif.

Ketua MPP menyatakan secara jelas dan tegas, bahwa, makna PKS sebagai Partai Terbuka itu harus melihat AD/ART partai yang masih berlaku. Gagasan “Partai Terbuka” yang dilontarkan oleh beberapa elit PKS pada Munas 2010 yang lalu cukup menarik perhatian publik, khususnya media massa yang mestigmakan PKS sebagai partai eksklusif selama ini.

PKS tetap merupakan Partai Kader dengan segala ketentuan sebagaimana diatur oleh AD/ART. PKS mempunyai peraturan yang detil tentang persyaratan pejabat structural partai. Dalam konteks ini, struktur di daerah beranekaragam statusnya ada struktur mandiri, penanganan, struktur pembinaan dan lain sebagainya. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan SDM kader di daerah yang terkait.

Oleh karena itu, selama masih ada kader partai yang memenuhi syarat untuk mengisi sebuah jabatan struktural tertentu, jabatan tersebut tidak dapat diisi oleh kader yang tidak memenuhi syarat. Kendatipun, memang terdapat pengecualian pada situasi-kondisi khusus. Dan, keterbukaan itu tepat jika dimaknai PKS bisa menampung aneka ragam potensi pada berbagai level jabatan publik.

5.3. Orientasi Ideologi Islamisme

Untuk lebih memahami hakikat ideologi, pemikiran keagamaan, corak pandangan keindonesiaan, dan pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam PKS sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, perlu kiranya kita mengkaji lebih mendalam mengenai model pengkaderan PKS. Majelis-majelis yang disebut Tarbiyah dan forum-forum pengkaderan partai telah menjadi medan pembentukan ideologi, pemahaman keislaman, dan pandangan politik tentang kebangsaan. Dalam pengkaderan ini pula pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM) ditransmisikan kepada kader-kadernya.

Teori kesempatan politik (*political opportunity structure*), dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor internasional dan domestik yang membuahi dan membidani kelahiran PKS. Teori pengerahan sumber daya (*resources mobilization*) menerangkan evolusi PKS sejak zaman Jama'ah Tarbiyah sampai zaman 'kegalauan partai terbuka'. Sedangkan teori pemingkanaan aksi kolektif (*collective action framing*) untuk mengulas ideologi kader partai yang *militant*.

PKS adalah partai sekaligus pergerakan, "partai yang tidak biasa" yang sempat menjadi "primadona". Hal ini suka atau tidak suka harus mampu bersilat dalam ketegangan jurus kepartaian dan kepergerakan, Kedua "sayap" tersebut tidak boleh patah, tapi harus dikelola dengan bijaksana. Kubu *hizb* (partai) harus memerhatikan gejolak batin kelompok *harakah* (gerakan), karena *hizb* pada hakikatnya perpanjangan dari *harakah*. Pergerakan adalah partai dan partai adalah pergerakan (Tempo edisi 26 Maret–01 April 2012).

Di sinilah perlunya menganalisis PKS sebagai partai dan sekaligus pergerakan yang percaya akan karakter Islam yang integral (*kamil*) dan meliputi semua (*syamil*), dengan kombinasi teori-teori ilmu sosial; *unity of sciences* (pendekatan integrative). Politik itu bagian dari ibadah, agama, dan negara. Dalam konteks ini, menurut M. Natsir; "Dakwah itu tidak lebih rendah daripada politik.

Aksi-aksi kolektif PKS, menunjukkan adanya *gap* yang menganga antara kehendak menjadi partai terbuka dan perlunya memelihara perasaan kader inti PKS. Lewat analisis peristiwa protes (*protest-even analysis*), fakta bicara bahwa 6 dari 10 peristiwa kolektif PKS dari tahun 1998-2007, tak ada sangkut pautnya dengan isu domestik yang bersifat non-Islamis. Ada 62,2 % aksi massa PKS didominasi oleh isu-isu

Islamis seperti anti-Amerika, anti-Zionisme, dan pembelaan terhadap Palestina sebagai bagian dari *global ummah*.

5.4. Implikasi Teoritik

Berdasarkan uraian kerangka teoritik pada Bab 1 sub 1.6 yang meliputi basis sosial, strategi politik, dan pendekatan integrasi gerakan sosial maka implikasi teoriknya adalah bahwa PKS tidak lahir sebagai representasi dari sebuah kelas sosial tertentu, melainkan dari sebuah ideologi, atau pemikiran keagamaan Islam. Realita sosial dan politik dengan sistem demokrasi yang berlangsung saat ini, maka PKS untuk bisa eksis harus memperluas basis sosial pemilihnya, sekaligus menerapkan strategi politiknya yang relevan dan dinamis. Berikut ini gambaran implikasi teoritiknya:

Tabel 5.1
Eksistensi PKS di Kebumen

Eksistensi PKS Kabupaten Kebumen Sebagai Gerakan Sosial					
Partai Kader (Ciri Umum)		Temuan (pendukung)	Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan (Ciri Khusus)		Temuan (pendukung)
1.	Basis Sosial: Muslim, Kota, Terdidik, Muda. Konstituen pemilih yang relatif kecil	Perolehan suara; Tahun 1999: 4244 Tahun 2004: 20965 Tahun 2009: 29569 Tahun 2014: 50355	1.	Dominasi ideologi Islam	Pemilihan format terbuka. Muncul Faksionalisasi Harakah versus Hizb. "Gerakan Dakwah" dengan doktrin "(jama'ah adalah

					partai, dan partai adalah jama'ah), serta azas Islam yang termaktub dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.
2.	Strategi Pengembangan/perluasan basis pemilih.	Wacana menjadi Partai Terbuka,(Inklusif), Tagline yang “ngepop” dan kontroversial, Misalnya: “Biar Kempes Tetep PKS”, PKS: Partai Kita Semua. Munas di Bali (2009), dan Hotel Ritz Carlton the Pacific Munas di Bali (2009) dan di Hotel Ritz Carlton the Pasific (2010).	2.	Struktur organisasi yang cenderung Oligarkis	Ketua Majelis Syura atau Murraqib ‘Amdan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau Majelis Riqabah ‘Ammah yang memiliki otoritas yang sangat besar
3.	Struktur/Susunan	Dewan Pimpinan	3.	Mekanisme “demokrasi	Pemilihan raya untuk

	organisasi Hirarkhis, vertikal yang kuat.	Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), DPD (Kabupaten/Kota), DPC (Kecamatan), dan DPRa (Kelurahan/Desa).		terbatas” untuk mewadahi partisipasi akar rumput.	memilih sebagian dari anggota Majelis Syura yang mewakili para kader di seluruh Indonesia
4.	Kombinasi dana taktis, sumber financial dari anggota dan publik	Iuran Anggota, potongan gaji anggota legislatif, dan pejabat publik dari PKS, dana aspirasi; subsidi negara, donator	4.	Sistem kaderisasi yang ketat, selektif, dan berjenjang.	Sistem tarbiyah dengan enam level keanggotaan dan mekanisme taqwim (evaluasi) kenaikan level.

Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber

Kemudian sebagai implikasi teoritik strategi politik pengembangan PKS di Kabupaten Kebumen dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kebumen dapat diilustrasikan secara sederhana dalam tabel berikut ini:

Tabel: 5.2
Ilustrasi Strategi Peperolehan Kursi PKS Kebumen

No.	Strategi Gerakan / Respon Isu	PK 1999	PKS 2004	PKS 2009	PKS 2014
1.	Ofensif (sosialisasi atribut PKS), Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bhakti Sosial, Bantuan Bencana Alam	0			
2.	Ofensif, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bhakti Sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan		0		
3.	Ofensif, Strukturisasi, Kaderisasi, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bhakti Sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan, Inklusivisme, Pola Komunikasi Politik,			2	
4.	Ofensif, Strukturisasi, Kaderisasi, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bhakti Sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan, Inklusivisme, Ta'awun (Bantuan Pinjaman Finansial), Kuota Perempuan				3

Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber

Berikut ini Tabel Gerakan Kader PKS Kebumen Di Era Reformasi:**Tabel 5.3**

Mobilisasi Kader PKS Kebumen di Era Reformasi

No.	Gerakan Perluasan Jaringan	Rahadi	Suratno	Ermi Kristanti	Herni Ning Susanti	Nur Hidayati
1.	Modal Awal: Ekonomi, Kultural	Harta Keluarga, Penghasilan Pekerjaan Guru, S1	Harta Keluarga, Penghasilan Pekerjaan Driver, SMU	Harta Keluarga Penghasilan Pekerjaan, S2	Harta Keluarga, Penghasilan Pekerjaan, S1	Harta Keluarga Penghasilan Pekerjaan Konsultan;S1
2.	Jaringan Ormas/Islam/Sosial Lain	Muhamadiyah, Asosiasi Guru	Serikat Pekerja (Sopir)	Ikatan Istri Dokter	Pengurus DPC PKS Kebumen	Pengurus DPD PKS Kebumen
3.	Kedudukan Politik Yang Dicapai	Anggota DPRD Kebumen, 2009-2014	Anggota DPRD Kebumen, 2009-2014	Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019	Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019	Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019

Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber

5.5. Kekuatan dan Kelemahan PKS di Kebumen.

5.5.1. Kekuatan PKS di Kebumen:

- a. Bahwa eksistensi PKS di Kebumen tidak bisa lepas dari kelahiran PK yang idealis, ideologis dan islamis.
- b. PKS sebagai partai kader mempunyai struktur yang sangat kuat di mana setiap jenjang kepengurusan memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh kadernya.
- c. PKS mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap persoalan-persoalan masyarakat seperti kesenjangan sosial, bencana alam, bekerja secara ikhlas (tanpa pamrih) membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah.
- d. PKS mempunyai mesin politik yang tak berhenti bekerja yaitu pengorbanan dari setiap kader-kadernya.

Sumber energi dan nafas partai ini berasal seluruhnya dari tetesan keringat kader yang mau berlelah-lelah bekerja, dari lembaran-lembaran rupiah yang disumbangkan setiap kadernya, serta luang waktu yang disediakan kader dalam setiap aktivitas kepartaian mereka.

- e. Sesungguhnya kekuatan utama yang dimiliki PKS terletak pada hati dan jiwa kader-kadernya yang selalu berusaha untuk sedekat mungkin dengan Tuhannya. Dengan bekal keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya, mereka menganggap bahwa apa yang diupayakan adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak pernah bersedih dan tidak pula putus asa dalam memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita mereka melalui PKS ini dan mereka selalu merasa bahwa Tuhan selalu bersama mereka, selama mereka tidak melanggar perintah-Nya. Inilah kekuatan PKS yang sesungguhnya.

5.5.2. Kelemahan PKS Kebumen:

- a. Rentan komodifikasi agama, pada umumnya ‘jualan’ agama hampir terjadi dalam setiap partai Islam, memperjualbelikan ayat-ayat suci, mereka lupa bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun Indonesia bukanlah negara agama.
- b. Akarnya PKS berada di Timur Tengah, bukan Indonesia. Berbeda dengan partai-partai yang berbasis Islam seperti misalnya PKB, PPP, dan PAN yang lebih memahami bahwa negara ini multikultural. Bahwa sikap resistensi PKS terhadap apa yang selama ini dipandang kalangan sebagai TBC (Tahayul, Bid’ah dan Churafat) maka tak jarang muncul penolakan

dari kalangan Islam tradisional, utamanya di kalangan pesantren, yang diwujudkan dengan sikap berhati-hati terhadap kelompok yang sering diidentikkan dengan gerakan Wahabi ini.

- c. Semangat perjuangan Islam dalam PKS, secara tak sadar telah melahirkan fanatisme Islam yang berlebihan sehingga menimbulkan *gap*, ketegangan dan friksi dengan agama lain.
- d. Berkembangnya klaim kebenaran (*truth claim*) di kalangan PKS untuk mengembalikan semangat pada kemurnian Islam, menyebabkan kalangan PKS cenderung tidak toleran terhadap perbedaan pemahaman keislaman dengan golongan Islam lain.

5.6. Proyeksi PKS: Genre Baru Islam di Indonesia

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, teologis, maupun ideologis maka PKS merupakan genre baru Islam di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa ada terminologi dalam tiga kategori yaitu: Islam tradisional, Islam modernis, dan Islam neomodernis atau Islam postradisional, namun PKS tidak bisa digolongkan dalam salah satu dari kategori tersebut.

Tarbiyah PKS bukanlah kaum Islam tradisional yang memiliki semangat dasar melestarikan dan memelihara paham dan penafsiran Islam yang telah mapan di Indonesia. Kalangan tradisional yang dimotori oleh organisasi NU, Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Perti, dan Nahdlatul Wathan ini memiliki ciri-ciri:

Pertama, akomodasionis terhadap kultur Islam lokal, seperti selamatan (tahlilan) pascakematian, menghormati dan menziarahi makam para wali, tradisi khaul (pengajian dan pembacaan doa pada peringatan hari kematian para leluhur), membaca al-Barzanji dan manakib para wali,

serta tradisi ilmu kanuragan (mistik). Terkait dengan kultur lokal ini, kalangan tradisional melakukan pembersihan dan pemurnian pada aspek muatan dan isi ritual dari sisa-sisa paganisme dan Hindu Budha, namun tetap mengakomodir bentuk dan Wadahnya. Selain itu, tingkat pemurnian yang dilakukan lebih longgar dan dilakukan dengan cara bertahap dan nyaris tidak kentara;

Kedua, menjadikan para kiai sebagai panutan dalam beragama maupun rujukan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, serta menjadikan budaya pesantren sebagai identitas kultural.

Ketiga, kecenderungan untuk bertaqlid kepada para ulama terdahulu, khususnya para Imam madzhab.

Keempat menjadikan kitab-kitab kuning (kitab-kitab yang ditulis para ulama Islam abad pertengahan) sebagai pembentukan tradisi intelektual keagamaan mereka.

Kelima menjadikan tradisi tasawuf (tarekat) sebagai jalan penyempurna keislaman mereka. Dan, *keenam*, tidak menjadikan aktivisme politik kekuasaan sebagai bagian integral dari kesalehan seseorang. Akan tetapi, Islamisasi kehidupan diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan *amaliyah-ubuddiyah* masyarakat yang lebih ortodoks melalui dakwah dan pendidikan.

PKS juga bukan bagian dari kelompok Islam modernis yang menggabungkan antara semangat *purifikasi* (kembali pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang murni) dan kemodernan dalam ajaran dan agenda perjuangan mereka. Kalangan Islam modernis menyuarakan pembersihan Islam dari unsur-unsur luar yang mengotori Islam yang dikategorikan sebagai bid'ah, syirik, dan khurafat. Tradisi-tradisi lokal yang selama ini dilestarikan kalangan tradisionalis menjadi sasaran pemurnian.

Di sisi lain, kalangan Islam modernis menolak taqlid kepada para imam madzhab dan menyerukan penggunaan rasio untuk berijtihad. Dalam kerangka mengedepankan ijtihad ini, kalangan modernis menyerukan untuk meninggalkan pemikiran para ulama salaf (kitab kuning), termasuk meninggalkan pemikiran para imam madzhab. Penggunaan rasio ini juga diperlukan dalam rangka mencari pemahaman-pemahaman yang baru terhadap ajaran Islam sebagai ekspresi keberpihakannya pada kemajuan dan modernitas. Kalangan modernis juga tidak anti Barat, dan bahkan sebaliknya banyak mengadopsi gagasan-gagasan dari Barat.

Kaum Islam modernis di Indonesia diwakili oleh dua kecenderungan : *Pertama*, gerakan rektifikasi (rectification) yakni gerakan pemurnian yang dilakukan dengan cara rigid dan keras dan langsung mengarah pada perubahan pemahaman keislaman yang murni. Gerakan ini mirip dengan gabungan pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Rasyid Ridla. Gerakan Paderi di Sumatera Barat, PERSIS, dan Al-Irsyad mewakili kecenderungan ini. *Kedua*, purifikasi yang dilakukan dengan cara akomodasionis disesuaikan dengan modernitas. Model pemurnian yang lebih longgar dan lebih banyak merujuk pada gabungan pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Muhammad Abduh ini diwakili oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, secara umum, modernitas yang disuarakan Muhammadiyah lebih tampak sebagai fenomena artifisial karena berbenturan secara frontal dengan purifikasi dan literalisme ala Abdul Wahhab. Itulah sebabnya, semangat ijtihad, rasionalisme, dan menerima pemikiran Barat ala Muhammad Abduh bahkan di kalangan pesantren yang disebut sebagai kaum tradisionalis bahkan di

kalangan pesantren yang disebut sebagai kaum tradisional.

Tarbiyah PKS bahkan juga memusuhi kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan Islam neomodernis atau postradisional. Kalangan “konvergen” tradisional-modernis (memadukan antara warisan intelektual klasik (kitab kuning) dengan pendekatan analisis rasional) ini dianggap telah menyebarkan pemahaman yang liberal terhadap ajaran Islam. Mereka tidak disukai oleh para pendukung Tarbiyah PKS karena agenda-agenda yang mereka lakukan, seperti anjuran menafsirkan ajaran Islam secara lebih rasional dan kontekstual.

Selain itu, kampanye mereka tentang toleransi, kerja sama antar agama, dan pluralisme dianggap telah melemahkan semangat dakwah dan melemahkan komitmen pada kejayaan Islam. Kritik kalangan ini terhadap agenda penerapan syari’at Islam dalam kerangka hukum formal juga bertabrakan secara frontal dengan PKS.

Tarbiyah/PKS yang berakar pada pemikiran Ikhwanul Muslimin ini menempatkan diri sebagai kritik *clan* penyempurna (perfeksi) dari jenis-jenis gerakan Islam yang telah ada. Di satu sisi, PKS menyerukan untuk memurnikan Islam dari pengaruh asing, menganjurkan untuk memahami Islam secara lebih *letter lux* (harfiah) dan membatasi penggunaan akal dalam memahami Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini merupakan watak dasar kaum fundamentalis-puritanis. Akan tetapi, PKS menghendaki cara yang lebih lunak dan bertahap seperti yang dipraktekkan kaum tradisional. Di sisi lain, PKS juga tidak meninggalkan begitu saja para ulama klasik dan para imam madzhab.

Oleh karena itu, dalam menyikapi isu bid’ah dan khurafat, PKS menerima praktek keagamaan kaum tradisional sejauh ada dasar dari pendapat ulama

terdahulu. Di sini, PKS bisa dikatakan sebagai “jembatan” antara kaum tradisional dan modernis sekaligus perfeksi dari keduanya. Akan tetapi, karena kehadirannya berpretensi sebagai penyempurna dari keduanya, PKS justru kurang berhasil dalam “menjembatani” kaum tradisional dan modernis dan justru berhadapan-hadapan dengan keduanya. Yon Mahmudi berpendapat bahwa PKS merupakan titik temu sekaligus penyempurna dari tradisionalisme dan modernisme Islam. (Mahmudi, 2005:95-99).

Aspek berikutnya dari penyempurnaan yang diagendakan PKS adalah menjadikan politik sebagai bagian penting dari agama. Dalam bangunan ajaran keislaman PKS, aktivisme politik menempati posisi yang sangat penting. Bagi kalangan Tarbiyah PKS, menjadi seorang muslim yang paripurna tidak saja menuntut kemurnian iman dan Islam, tetapi juga komitmen untuk memperjuangkan cita-cita ideologis Islam. Islam *kaffah* yang menjadi jargon PKS menghimpun semangat Islam fundamentalis-Islamis dengan pendekatan akomodasionis dan gradualis.

Namun demikian, sejalan dengan tantangan keindonesiaan yang dihadapi, baik oleh politisi PKS maupun para dai dan ulamanya, jalan moderat “terbatas” yang dianut PKS belumlah cukup menyelesaikan ketegangan. Oleh karena itu, PKS tetap dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pemahaman keislamannya. Secara perlahan, perubahan tersebut telah tampak di kalangan elit PKS, namun masih sangat samar di kalangan mayoritas kader. Meskipun perubahan itu tidak menyentuh hal yang fundamental, adaptasi dan penyesuaian terhadap konteks Indonesia telah menjadi kebutuhan di kalangan PKS dan menjadi fenomena menarik untuk diamati.

Perkembangan PKS ke arah yang lebih moderat dan makin akomodatif terhadap tradisi keagamaan Islam di Indonesia dipengaruhi beberapa hal: *Pertama*, semakin banyaknya para alumnus Timur Tengah dengan tradisi akademik Syari'ah dan tafsir Al-Qur'an. Disiplin ilmu Syari'ah dan Tafsir mengkondisikan para pengkajinya terbiasa dengan berpikir metodologis ala ushul fiqih dan qawa'id at-tafsir. Selain itu, keragaman pendapat dalam fiqh dan kitab-kitab tafsir mengajarkan kepada mereka bahwa pemahaman terhadap Islam tidak selalu tunggal.

Kedua, untuk mengontrol perolehan suara di pemilu legislatif, para aktivis PKS dituntut untuk keluar dari kampus dan bergerak di masyarakat. Di lapangan yang lebih luas ini para kader PKS dihadapkan pada masalah yang makin kompleks. Metode Tarbiyah di kampus tidak lagi cukup untuk meraih anggota yang cukup signifikan. Oleh karena itu, mereka dituntut mengubah strategi dengan beradaptasi dengan apa yang telah mapan di masyarakat dengan menarik batas toleransi lebih longgar. Mereka berkepentingan untuk menjadikan tradisi-tradisi agama seperti tahlilan, selamatan, barzanji, dzikir, dan sebagainya sebagai sarana dakwah. Selain itu, lembaga-lembaga agama yang mapan, seperti masjid, mushalla, langgar, majelis taklim, pesantren, dan madrasah' telah terlanjur memiliki tradisi yang khas Indonesia sehingga PKS berkepentingan untuk masuk dan menjalankan dakwahnya serta meluaskan pengaruh politiknya.

Ketiga, masuknya para dai dari pesantren yang berkultur NU cukup mewarnai pemahaman keagamaan di PKS. Bahkan, sebagian besar para anggota Dewan Syari'ah adalah mereka yang memiliki latar belakang pesantren dan kultur kiai yang kuat. Oleh karena itu, fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan Dewan Syari'ah PKS cenderung ke arah

moderasi. Akan tetapi, tampaknya pengaruh kultur NU di PKS masih terbatas pada fatwa fiqh dan belum pada perubahan karakter pemahaman Islam di jaringan Tarbiyah dan kader-kader PKS di tingkat bawah.

Keempat, pertumbuhan keilmuan dan kepribadian para aktivis PKS ke arah kedewasaan dan kematangan juga berperan dalam mengubah partai ini menjadi lebih bijaksana dalam berdakwah. Mereka tidak lagi mengandalkan *hamasah* (semangat) dan militansi semata, tetapi juga kearifan dan kebijaksanaan.

Kelima, adanya upaya PKS untuk mendapatkan legitimasi politik maupun keagamaan dengan Cara menampilkan PKS sebagai partai Islam yang berakar sejarah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengurangi dominasi pemikiran para ulama IM dalam pemikiran keagamaan PKS dan mulai ada upaya menghadirkan pemikiran-pemikiran ulama dan aktivis Islam Indonesia, seperti Muhammad Natsir, Agus Salim, Muhammad Rasyidi, dan Hasbi Asshiddiqi.

Keenam, adanya upaya dari para top leader-nya untuk mengedepankan pemikiran ulama-ulama yang lebih moderat, seperti pemikiran *mu'assis* awal IM, Hasan al-Banna, Hasan al-Hudzaibi, Musthofa asy-Syiba'i, dan Yusuf al-Qardhawi. Dalam proses moderasi pemikiran ini, peran al-Qardhawi terlihat menonjol. Ia dikenal sebagai tokoh Ikhwan yang menyuarakan pendekatan *washatiyyah* (moderat) dalam perjuangan. Dan, menjadi rujukan pemikiran kalangan aktivis Islam dari soal politik internasional hingga hukum Islam menyangkut kehidupan sehari-hari. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia, sehingga ia sangat berpengaruh di dunia Islam. (Bubalo dan 2005:37).

Pemikiran Sayyid Quthb yang lebih radikal, pada masa awal mula sangat berpengaruh di kalangan kader PKS. Tetapi lambat laun bisa diimbangi dengan pemikiran-moderat di kalangan top leader PKS. Hal ini berkaitan dengan kepentingan untuk menepis tuduhan terhadap PKS sebagai partai Islam radikal

5.7. Novelty

Temuan kebaruan disertasi ini dapat dibaca secara kombinasi (hibridasi) bahwa Partai politik bisa eksis tidak hanya dengan dukungan basis sosial saja tetapi harus memiliki ideologi, dan menerapkan strategi menyerang (ofensif). Adanya struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya yang dibingkai menjadi aksi kolektif, ataupun gerakan keagamaan. Kemudian ditopang dengan struktur organisasi secara vertikal yang kuat.